

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN DI KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1
Jurusan Pendidikan Akuntansi**



Oleh :

RITA LATIFA NUR LAILA
A 210 050 057

?

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan politik nasional yang sejalan dengan pergantian penguasa telah memicu perubahan-perubahan penting disuatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Perubahan yang dimaksud tertuang dalam kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam Undang-Undang No 32 Th 2004. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud. Oleh karena itu dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah mengadakan pembangunan sarana maupun prasarannya. Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki

potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing

Peranan Pemkab wonogiri pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya. Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintahan, pembangunan sektor fisik, sektor ekonomi, dan sektor lainnya. Apabila berbicara tentang otonomi daerah yang lahir dari sebuah UU No. 22 Tahun 1998 telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, maka tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang tentu saja memberikan peluang yang lebih luas kepada daerah untuk meningkatkan potensinya terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, Pemkab Wonogiri tidak perlu lagi minta izin kepada Pemerintah Pusat untuk berdagang, bahkan dalam bursa saham sekalipun. Hal ini terkait pula dengan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu kecilnya kemampuan daerah (34,96%), kurangnya kemampuan administrator (25,19%) dan keadaan infrastruktur daerah (21,48%), khususnya dalam hal ini yang mengkhawatirkan adalah faktor kemampuan keuangan daerah. Adanya perubahan sistem pencatatan akuntansi pendapatan dan belanja negara yang terintegrasi dan efektif, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh setiap daerah berbeda-beda.

Di tengah upaya Pemkab Wonogiri dalam perbaikan perekonomian saat ini, berbagai tantangan dihadapkan pada masing-masing daerah, yang mana

ditandai dengan adanya kelesuan dari pelaku pasar ekonomi, pasar modal, dan ditambah bencana alam yang sering terjadi saat ini. Hal tersebut berdampak kepada para investor, terutama investor asing yang enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Mereka menilai kondisi pemerintahan Indonesia yang kian tidak stabil, yang mana ditandai dengan perginya perusahaan atau investor asing dan beralih ke negara lain. Akibatnya mereka lebih memilih untuk menjual sebagian sahamnya karena dianggap tidak menguntungkan. Bertolak dari banyaknya faktor-faktor penyebab tersebut, besar/kecilnya investor di Indonesia yang melakukan transaksi di bursa akan berakibat pada fluktuasi harga saham.

Perubahan situasi ini salah satunya mempengaruhi reaksi investor, pendapatan negara, dan juga pendapatan daerah terhadap hasil dari investasi. PAD adalah indikator yang mengerakan roda pembangunan di masing-masing daerah otonomi. Pada daerah yang tidak memiliki sumber pendapatan, akan sangat merasakan pengaruh dari investasi yang masuk ke daerahnya tersebut. Kabupaten Wonogiri adalah salah satu daerah yang masih sedikit dalam memiliki PAD.

Para investor mungkin belum melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan, atau mungkin kurangnya informasi dari pihak Pemkab dalam menarik investor untuk masuk dan menanamkan investasinya ke Kabupaten Wonogiri. Pertumbuhan daerah dapat diprosikan dengan berbagai macam kombinasi nilai aset kesempatan investasi. Esensi pertumbuhan bagi suatu daerah adalah adanya kesempatan investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Pilihan-pilihan pertumbuhan (*growth option*) bagi suatu daerah

merupakan sesuatu yang secara melekat bersifat tidak dapat diobservasi (*inherently unobservable*).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Kabupaten Wonogiri**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan rumusan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana pola perkembangan PAD di Pemkab Wonogiri pada tahun 2004-2008?
2. Bagaimana pola perkembangan Dana Perimbangan di Pemkab Wonogiri pada tahun 2004-2008?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini untuk mengetahui pola perkembangan PAD dan Dana Perimbangan dari tahun 2004-2008. Agar penelitian ini mengarah pada pokok permasalahan yang akan dipecahkan, maka dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan dan obyek yang diangkat, yang meliputi:

1. Komponen PAD tahun anggaran 2004/2005/2006/2007/2008 yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian Laba BUMD

- d. Lain-Lain Pendapatan
2. Komponen dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2004/2005/2006/2007/2008

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Menganalisis perkembangan PAD tahun 2004-2008 di Pemkab Wonogiri.
2. Menganalisis perkembangan Dana Perimbangan tahun 2004-2008 di Pemkab Wonogiri.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai perkembangan masing-masing daerah dan juga keberhasilan penataan ekonomi dalam otonomi daerah. Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Bagi Pemkab Wonogiri

Memberi masukan bagi pihak Pemkab Wonogiri sebagai referensi untuk mengolah perkembangan PAD dan Dana Perimbangan yang efektif dan efisien.

2. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan berguna sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun garis besar pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun garis besar pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi landasan teori yang mencakup masing-masing komponen dari PAD dan tiap-tiap komponen Dana Perimbangan tahun anggaran 2004-2008.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dilakukan metode analisis data, yang berupa penjabaran angka-angka yang telah dikumpulkan untuk membuktikan rumusan masalah pada bab sebelumnya, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.